

RUANG UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN POLITIK

DINAMIKA POLITIK LOKAL DI INDONESIA

REKAMAN
PROSES
SEMINAR
INTERNASIONAL
KE TUJUH

EDITOR:
NING RETNANINGSIH
I MADE SAMIANA
HALOMOAN PULUNGAN
WIDYA P. SETYANTO



ff
The Ford Foundation



DAFTAR ISI

Sekapur Sirih _ iii

Daftar Isi _ v

Pendahuluan _ vii

Sesi Refleksi HUT 10 Tahun Percik

(Pradjarta Dirdjosanjoto, Soetandyo Wignjosoebroto, Philip Quarles van Ufford, Arief Budiman) _ 1

Sesi Pembukaan

(Nico L. Kana, Pradjarta Dirdjosanjoto) _ 29

Sesi Nada Dasar

(Bob Sugeng Hadiwinata) _ 39

Sesi Pertama

(Wulansari Dyah Rahayu, **Triyono Lukmantoro**, Ibrahim, Suhud Darmawan - Siti Fatimah, Moh. Shohibuddin) _ 55

Sesi Kedua

(W. Riawan Tjandra, Yaqub Cikusin, Sujadi, Supardal) _ 91

Ikhtisar Sesi Pertama - Sesi Kedua _ 117

Sesi Ketiga

(Hasanuddin, Jaka Triwidaryanto, Riwanto Tirtosudarmo) _ 125

Sesi Keempat

(Farsijana Adeney Risakotta, M. Halim - Abdul Aziz, Najib Husain) _ 143

Sesi Kelima

(Syafuruddin, Achmad Maulani, Nurhasanah - Almira Giovanni) _ 167

Ikhtisar Sesi Ketiga - Sesi Kelima _ 189

Sesi Keenam

(Nur Aliem - Jumrana, Edison - Yusuf Rahmat Demandulu, Gazalirrahman) _ 195

Sesi Ketujuh

(Prasetyo Aribowo, Marselino Djeer, Wawan Masudi, Adrian Adinabung, Hary Wahyudi) _ 219

Sesi Kedelapan

(R. Alam Surya Putra - Hari Kusdaryanto, Laila Kholid Alfirdaus - Fitri Zakiah, Akhmad Firman, Eka Suaib) _ 251

Sesi Kesembilan

(Rofiko Rahayu Kabalmay, Theodorus Wuryantono, Hasrul Hanif - Nur Azizah - Yusnita Christanti, Longgina Novadona Bayo - Retno Agustin) _ 279

Sesi Kesepuluh

(Y. Argo Twikromo, M. Mabrur Hasian, Badrus Sholeh) _ 301

Ikhtisar Sesi Keenam - Sesi Kesepuluh _ 319

Kesimpulan Seminar Internasional Ketujuh Dinamika Politik Lokal "Ruang untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik" _ 327

Lampiran

Kerangka Acuan Seminar Internasional Ketujuh _ 351

Daftar Peserta Seminar Internasional Ketujuh _ 361

melegitimasi kandidat, dan sekaligus merepresentasikan kandidat, namun juga melakukan misrepresentasi dan delegitimasi terhadap kandidat yang lain. Wacana-wacana yang banyak berkembang untuk ring tengah antara lain Suharto – Badingah adalah tokoh gerakan moral, politisi bersih, pemimpin yang berkualitas. Sementara untuk ring selatan atau pinggiran, wacana Suharto - Badingah sebagai pasangan putra daerah yang dekat dengan Sultan, sederhana, dan merakyat. Nampak sekali perbedaan dari ring tengah yang cenderung di *blow-up* dengan wacana-wacana yang mengedepankan rasionalitas dan pendidikan, sementara ring selatan cenderung ditonjolkan kultur atau budaya masyarakatnya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kemenangan pasangan Suharto – Badingah yaitu riset yang akurat, pemilihan target sasaran yang tepat, keampuhan peran wacana, dan pilihan media komunikator berupa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh panutan yang bermoral baik dan belum memiliki cela, serta kehebatan tim sukses dalam merancang strategi yang lain dari kandidat lainnya.

Terakhir, sebagai sebuah refleksi, hati-hati dengan wacana. Penggunaan wacana sebagai suatu strategi kampanye memang diakui sangat signifikan terbukti dalam kemenangan Suharto – Badingah di Gunungkidul, tetapi strategi ini harus diiringi dengan semangat kejujuran dan pencerdasan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan norma bermain yang arif dan elegan, sehingga tidak menimbulkan *gap* yang lebar antara citra yang terbentuk dengan citra yang sesungguhnya, karena *gap* ini bisa jadi akan menimbulkan pembajakan demokrasi oleh oknum-oknum oportunis.

Triyono Lukmantoro:

Saya ingin melakukan gugatan terhadap diri saya sendiri karena berita – berita di koran banyak melibatkan para akademisi, seolah-olah suatu berita menjadi tidak layak dibeli bila tanpa akademisi. Judul tulisan saya “Hegemoni Rezim Kebenaran Akademis dalam Wacana Politik Lokal”

Ada tulisan seorang rekan saya yang dimuat di koran

Wawasan satu hari menjelang Pilkada Demak edisi 25 Februari 2006, dengan judul yang sangat jelas menyebut siapa pasangan calon bupati - wabup pilihan masyarakat Demak, yang diikuti tulisan dalam tanda kurung "sebuah analisis Drs. Teguh Yuwono, Mpol. Admin". Dia ini rekan saya satu fakultas. Saya tidak akan menelanjangi dia, karena saya akan menelanjangi diri saya sendiri juga. Kalau saya baca advertorial itu dia sangat mendukung pasangan Endang Setyaningdyah - Nurul Huda. Tidak lama kemudian tanggal 28 Pebruari Tafta - Asyiq memenangi pilkada. Artinya rezim akademis kalah. Ini adalah kisah selembaar advertorial. Tidaklah benar kalangan akademisi selalu menunjukkan obyektivitas dan ketidakberpihakan dalam pilkada, termasuk dalam berita.

Di dalam media, akademisi selalu dikatakan sebagai pengamat sosial, pengamat kebudayaan, dan dalam kasus pilkada sebagai pengamat politik. Habermas mengatakan politik itu irasional, kacau balau, maka perlu diilmiahkan. Lebih khusus lagi Weber, dia melihat ilmu sebagai suatu hal yang bisa menata secara jelas antara sebab akibat, antara sarana dan tujuan. Maka dibentuklah sistem politik yang tatanannya ilmiah, sesuai dengan ilmu-ilmu yang sedang berkembang. Konsekuensinya, kehidupan politik secara langsung maupun tidak langsung menjadi semakin memperluas ruang lingkup kekuasaan kalangan akademisi yang ada di kampus.

Sebelum Habermas, Henri de Saint - Simon mengatakan bahwa dunia dapat diselamatkan apabila kalangan ilmuwan dapat membentuk sebuah dewan internasional dan mengambil alih arah kehidupan masyarakat. Jadi sudah lama, *wild to power* dari kalangan akademisi atau ilmuwan ini ada. Auguste Comte pada tahun 1822 mengemukakan tahapan-tahapan sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Tahap pertama adalah tahap teologis, menjelaskan mengenai animisme roh-roh atau dewa-dewa. Tahap kedua adalah metafisis, menjelaskan spekulasi filosofis yang abstrak. Sekarang ini adalah abad pencerahan, yang berkuasa adalah kalangan ilmuwan, akademisi, yang

memberi penjelasan ilmiah berdasarkan observasi, eksperimen, dan perbandingan, umpamanya melalui tulisan-tulisan.

Politik itu suatu wilayah dunia kehidupan yang isinya spontan, emosional, penuh permainan yang ditata sistematis menjadi sangat rapi. Yang diuntungkan oleh itu adalah akademisi, karena mereka merupakan kekuatan sosial yang bekerja di dunia pendidikan, yang memiliki klaim-klaim evaluatif tentang rasional atau tidaknya suatu perhelatan pilkada, sehingga ada kekuasaan di situ, dan di situ juga wacana terbentuk. Wacana saya terjemahkan dari *discourse*. Wacana bekerja layaknya mesin sortir, bisa memilih dan memilah secara otomatis, siapa, apa dan pihak mana yang layak dilibatkan, dan pihak mana serta ucapan apa yang layak disingkirkan. Menurut Foucault ada tiga aturan yang menjadikan wacana terbentuk, yang pertama adalah obyek wacana yang boleh dibicarakan, kedua adalah siapa atau pihak mana yang diperbolehkan untuk berbicara, dan ketiga konsep-konsep, teori-teori, atau jenis-jenis pengetahuan yang diterima sebagai benar atau salah dalam wacana itu.

Wacana terbentuk berkat dukungan media massa, namun jangan dianggap bahwa media sebagai suatu kekuatan ekonomi politik bisa merefleksikan kenyataan sosial secara netral dan obyektif. Saya menyatakan bahwa media adalah pihak yang menjalankan pendefinisian terhadap realitas sosial, hanya saja media tidak bisa bekerja sendirian. Media merupakan kekuatan mediasi. Pada saat melaporkan berbagai kejadian, media mengemukakan hasil interpretasinya terhadap kejadian-kejadian yang diliput. Artinya media tidak terpisah dari realitas sosial, tapi media merupakan salah satu bagian dari realitas sosial. Media tidak bisa menyoroti semuanya karena media mempunyai mekanisme kerja yang dinamakan nilai berita. Setiap berita berasal dari fakta, tapi tidak setiap fakta bisa jadi berita. Ada penilaian-penilaian khusus, ada kualifikasi tertentu yang digunakan oleh media untuk menentukan layak tidaknya suatu berita, umpamanya penjahat kelas teri ditangkap sudah biasa, tapi kalau dipukuli dan berdarah-darah, ini

baru berita. Setelah itu media menampilkannya pada publik, muncullah definisi dari publik. Definisi dari pihak media sendiri terjadi melalui penyortiran wacana, ada kenyataan sosial yang sengaja ditonjolkan dan ada kenyataan sosial yang disembunyikan bahkan dihilangkan. Inilah konsekuensi dari media ketika menjadi *definers of social reality*. Dalam hal ini hegemoni muncul pada saat masing-masing pihak yang melontarkan definisi diposisikan, dicitrakan serta diakomodasikan komentar-komentarnya.

Kasus yang lebih spesifik di Demak adalah perang antara Tafta - Asyiq dan Endang Setyaningdyah yang sudah mulai pada pertengahan 2005. Ketika itu Endang memecat Tafta sebagai Sekretaris Daerah dengan alasan Tafta sudah terlalu lama dan harus diganti atau dimutasikan. Media menganggap bahwa Endang terlalu arogan. Dengan sangat pintar Tafta mengatakan PNS harus netral, disesuaikan dengan hati nurani. Artinya pada satu sisi media mencitrakan Tafta sebagai pihak yang termarginalkan, sedangkan Endang sebagai pihak yang melakukan penyingkiran.

Dalam kampanye, Komando Masyarakat Demak meminta supaya Kejari mengusut kasus korupsi di daerah Demak. Yang disorot sebenarnya bupati *incumbent*, yaitu Endang. Endang mengerahkan massa yang lain. Ini mengingatkan saya tentang fenomena *mobocracy*, massa yang cenderung melakukan pengrusakan, agresif, dan lain-lain. Koran-koran lebih sering menyoroti Endang, antara lain kasus penggunaan pendapa sebagai fasilitas publik, yang oleh panwas dianggap suatu pelanggaran. Yang membuat heboh besar-besaran adalah Manajer PSIS, anak Endang yaitu Yoyok Sukawi mengundang dua striker bintang PSIS (Emmanuel de Porras dan Gustavo Hernan Ortiz) untuk menjadi jurkam. Tapi ini malah menjadi *blunder* sehingga memunculkan reaksi macam-macam dari lawan politik, dari anggota DPRD, bahkan dari akademisi. Dan akademisi adalah yang paling meyakinkan karena langsung merujuk undang-undangnya.

Di lain sisi, koran lebih suka menampilkan rakyat sebagai tukang judi, karena di Demak pilkada dijadikan taruhan. Kemudian setelah pasangan Tafta menang, pendukungnya jalan mundur sejauh 10 km dijadikan berita. Sementara itu rakyat yang kelihatan cerdas, berani mengkritik, tidak ditampilkan. Rakyat hanya ditampilkan di media jika melakukan tindakan yang tidak lazim dan menunjukkan keganjilan. Mitos rakyat sebagai penentu dalam pilkada terus diproduksi oleh media dengan teknik kerjasama dengan akademisi. Rakyat tidak pernah ditampilkan seperti apa gagasannya, bagaimana wacananya. Disinilah rakyat mengalami diskualifikasi dalam pemberitaan pilkada karena yang dianggap benar adalah rezim akademisi. Ada tiga hal yang saling berkaitan. Yang pertama, tipe-tipe wacana yang memiliki fungsi untuk menunjukkan dan mengarahkan sesuatu diterima sebagai benar adanya, umpamanya kalau akademisi atau pakar yang bicara, kebenarannya dipercaya. Kemudian, ada mekanisme dan contoh-contoh yang menjadikan seseorang mampu membedakan yang salah dan yang benar. Ketiga status dari pihak-pihak yang dianggap benar.

Akhirnya rakyat mengalami diskualifikasi, kemudian mengalami keterasingan, karena oleh media dianggap tidak memiliki perangkat pengetahuan yang mampu menopang klaim-klaim kebenaran yang disampaikan.

Jurnalisme dominan seperti ini, saya kira perlu dibongkar, dan saya mencoba melontarkannya pada forum ini.

Ibrahim:

Penelitian saya berjudul Pilkada dalam Konstruksi Media Massa Lokal, Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Isu-isu Pemilihan Gubernur pada Harian Pagi Babel Pos, Rakyat Pos, dan Bangka Pos Menjelang Pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Ini menjadi menarik karena pilkadanya baru akan dilaksanakan pada Februari 2007, tetapi perang wacana di media massa sudah berlangsung jauh-jauh hari, bahkan sejak setengah tahun yang lalu.